

## RINGKASAN

**“MEKANISME PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR”**, Nabilla Alya Ramanda Putri, Nim D42220968, Tahun 2026, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Enny Budhiarti (Pembimbing Lapang) dan Avisenna Harkat SE., M.M. (Dosen Pembimbing).

Pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember memiliki bobot 20 Satuan Kredit Semester (SKS), dengan jangka waktu 4 bulan efektif mulai bulan September hingga Desember 2025 atau setara dengan 700 jam, dan dilakukan pada awal semester VII (tujuh). Dukungan pelaksanaan kegiatan magang oleh Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur merupakan salah satu instansi vertikal yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pusat koordinasi bagi enam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

Struktur organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur terdiri dari 1 bagian dan 5 bidang, diantaranya Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Penilaian, Bidang Lelang, Bidang Piutang Negara, dan Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, serta terdapat Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi terdiri atas Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Hukum, dan Seksi Informasi. Bidang ini bertugas untuk menyiapkan bahan bimbingan serta melaksanakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja. Selain itu, bidang ini juga melaksanakan pemantauan dan pengendalian intern, pengelolaan kinerja serta risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap kode etik, disiplin pegawai, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Bidang ini juga berperan dalam merumuskan rekomendasi

perbaikan proses bisnis, menangani perkara, serta memberikan pendapat hukum. Di sisi lain, bidang ini turut bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan perangkat, jaringan, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Manajemen risiko dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan: penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, serta penanganan risiko. Proses ini didukung dengan pemantauan dan evaluasi berkala, serta pelaporan dan komunikasi risiko kepada pimpinan. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan mendukung pencapaian kinerja Kanwil DJKN Jawa Timur secara akuntabel dan berkelanjutan.